

Strategi Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Pengelolaan Informasi Publik

Febyyola W Kilmanun¹, Yustina Sopacua²

¹ Universitas Pattimura, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi,
febyyolakilmanun@gmail.com

² Universitas Pattimura, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi,
yustinasopacua25@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang strategi humas dinas komunikasi dan informatika kabupaten maluku tenggara dalam pengelolaan informasi publik. Dengan tujuan agar mengetahui bagaimana strategi dan tahapan yang dilakukan dinas komunikasi dan informatika abupaten malukutenggara dalam pengelolaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diambil melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara, Informan dalam penelitian ini Kepala Dinas dan Staf Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara yang sekaligus bergerak di bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara memainkan peran penting dalam mendukung pemerintah dan pembangunan daerah. Mereka fokus pada memastikan akses informasi mudah bagi masyarakat, terutama di daerah yang sulit terjangkau oleh internet atau memiliki tingkat literasi rendah. Diskominfo menggunakan berbagai strategi, termasuk media sosial, platform digital, serta stasiun radio dan televisi berlangganan. Mereka juga bertanggung jawab atas penyedia layanan informasi publik melalui berbagai platform online dan tujuh aplikasi pelayanan publik.

Kata Kunci: Strategi Humas, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pengelolaan Informasi

Abstract: This research discusses the public relations strategy of the Southeast Maluku Regency communications and information services department in managing public information. With the aim of knowing the strategies and stages carried out by the Southeast Maluku district communications and information services department in managing public information. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques were taken through interviews and documentation. This research was carried out at the Southeast Maluku Regency Communication and Informatics Service. The informant in this research was the Head of the Department and Public Relations Staff of the Southeast Maluku Regency Communication and Informatics Service who also operates in the field of Information and Public Communication. The Southeast Maluku Regency Communication and Information Service plays an important role in supporting the government and

regional development. They focus on ensuring easy access to information for the community, especially in areas where the internet is difficult to reach or have low literacy levels. Diskominfo uses various strategies, including social media, digital platforms, as well as subscription radio and television stations. They are also responsible for providing public information services through various online platforms and seven public service applications.

Keywords : Public Relations Strategy, Communication and Informatics Service, Information Management

1. Pendahuluan

Pada era keterbukaan informasi saat ini, kehidupan ditandai dengan berkembangnya pengetahuan teknologi dan informasi yang semakin pesat. semua pihak membutuhkan informasi berkualitas tinggi dari setiap organisasi dan instansi di zaman keterbukaan informasi ini. Pemerintah harus lebih proaktif dan inovatif dalam mengemas komunikasi mengingat dinamika komunikasi saat ini. Isu ini sejalan dengan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi publik. Maka untuk menangani data tersebut, kantor otoritas publik membentuk Divisi Periklanan (Humas). Humas memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan lembaga. Dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi antara lembaga dengan masyarakat umum, humas berfungsi sebagai perantara.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Informasi Publik berlaku sejak 1 Mei 2010. Keyakinan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan status sosial lingkungannya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia, menjadi landasan lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 1945. Informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini, serta informasi terkait lainnya untuk kepentingan publik, yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik merupakan informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 mendefinisikan badan publik sebagai setiap badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lainnya yang tugas utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan dananya berasal dari. Anggaran Pendapatan dan Belanja. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah menyediakan sebagian atau seluruh pembiayaan untuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Humas adalah bagian penting dari pemerintah kabupaten untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. cukup penting dalam pelaksanaan aturan tersebut. Selain itu, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap badan publik untuk menjamin informasi yang tersedia dan terbuka untuk umum cepat, tepat waktu, murah, dan dengan cara yang mudah. Dengan undang-undang yang mengamatkan keterbukaan informasi publik, Humas dibutuhkan untuk memiliki kemampuan profesional, terutama dalam memberikan persepsi kepada masyarakat, tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui rekaman baik internal maupun publikasi melalui media, yang berarti manajemen komunikasi diperlukan. yang bekerja dengan baik dan efektif. Kemajuan humas sebagai ilmu dan profesi tidak lepas dari kemajuan teknologi komunikasi. Dampak teknologi komunikasi terhadap kehumasan dapat berupa media kehumasan yang sederhana atau cara pandang baru kehumasan sehingga memunculkan nama humas, sehingga hal tersebut memunculkan istilah humas digital. Digital public relations adalah pelaksanaan humas dengan menggunakan media canggih/online untuk berbicara dengan masyarakat pada umumnya (Laksamana, 2015). Penemuan web 2.0 ini telah menghasilkan banyak perubahan pada aktivitas kehidupan manusia, termasuk cara berkomunikasi, berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Sebagai bagian dari

Humas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara , Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Untuk mempertahankan hubungan sosial yang positif. Bagian Humas Pemerintah Kabupaten menggunakan media untuk memberitahu masyarakat umum. Media massa berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas pada saat ini. Banyak organisasi-organisasi yang memanfaatkan komunikasi luas untuk memasukan data dan strategi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara harus memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik melalui pengelolaan informasi kehumasan yang efektif, yang akan meminimalkan persepsi negatif masyarakat dan menumbuhkan keterbukaan antara masyarakat dan kehumasan. Bagian pengelolaan informasi publik Diskominfo Kabupaten Maluku Tenggara bertugas menyiapkan informasi, formulasi dan bahan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungannya. Ruang lingkup pemerintahan daerah serta pengelolaan informasi pendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daerah dalam pemerintahan daerah, sesuai dengan uraian tugas di bidang informasi publik . Mengingat bahwa pemerintah daerah memiliki banyak kewenangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peraturan tentang kelembagaan (perangkat) daerah yang lebih berfokus pada lembaga yang dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Akibatnya, kelembagaan kominfo menjadi salah satu instansi yang cenderung tidak menjadi prioritas utama. Pada dasarnya, kelembagaan kominfo mampu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, eksistensi kelembagaan ini seharusnya lebih diprioritaskan daripada bentuk dan jenjang kelembagaan informasi daerah seperti dinas dan badan atau kantor dan bagian. Perbedaan posisi atau tingkat kelembagaan ini tidak hanya berkaitan dengan koordinasi akan tetapi yang lebih penting adalah fungsi pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat .

Keberadaan pemerintah kabupaten dan kota sebagai struktur pemerintahan yang paling dekat dan berpengaruh langsung kepada masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuatnya maka kelembagaan informasi dan komunikasi daerah harus menjadi suatu lembaga yang terpenting dalam mengelola informasi mulai dari menghimpun informasi, memproses informasi, dan menyebarkan informasi, selain itu seharusnya perlu disediakan sebagai penyedia informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat secara mudah, cepat dan murah, karena pemerintahan kabupaten dan kota merupakan pemerintahan yang paling banyak terkait dengan penyedia layanan kepada masyarakat terutama dalam bidang informasi dan komunikasi melalui Dinas Kominfo sebagai pengelola informasi publik di daerah.

Dalam hal ini sesuai dengan peran Diskominfo adalah mendukung urusan pemerintahan dalam bidang informasi, komunikasi, dan kegiatan penunjang lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah sehingga bertanggung jawab atas reputasi pemerintah dalam hal ini tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada setiap daerah maupun kota tertentu bertanggung jawab perihal informasi apapun dari suatu pemerintahan untuk disampaikan kepada masyarakat atau khalayak umum, bagi seluruh masyarakat kota tual dan sekitarnya , Dinas Komunikasi dan Informatika memegang peranan yang krusial karena adanya layanan komunikasi dan informasi, lebih mudah bagi individu untuk mendapatkan informasi terbaru dan untuk memfasilitasi kemampuan publik untuk mengajukan keluhan terkait persoalan serta permasalahan yang tengah dihadapi. Dalam hal layanan informasi, baik masyarakat umum maupun pemerintah berperan sebagai pengguna layanan. tugas pemerintah adalah melayani rakyat dengan mengawasi dan memantau opini dan kepuasan rakyat.

Adapun berbagai kendala yang dihadapi humas dinas komunikasi dan informatika maluku tenggara dalam pengelolaan informasi publik . Diantaranya Mengelola

informasi publik, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif atau kontroversial, dapat menjadi tantangan tersendiri. Humas Diskominfo perlu memiliki strategi komunikasi yang baik untuk mengatasi situasi ini dan menjaga kepercayaan masyarakat. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Pengelolaan media sosial merupakan aspek penting dalam komunikasi publik modern. Dalam hal ini yang menjadi kendala ialah jika tidak ada kebijakan yang jelas dalam pengelolaan media sosial misalnya kurang mengupdate, atau tidak ada sumber daya yang cukup untuk memantau dan merespons dengan cepat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya informasi publik dan hak mereka untuk mengakses informasi tersebut juga dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu Humas Diskominfo perlu melakukan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah juga yang menjadi kendala karena kesulitan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program informasi publik, masyarakat yang tidak aktif juga dapat menghambat efektivitas pesan yang ingin disampaikan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, Humas Diskominfo perlu melakukan perencanaan yang matang, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, dan terus mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi terkait informasi publik. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat juga sangat penting. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD

Sebagai penyedia media informasi sekaligus melayani masyarakat yang dikemas dalam media yang bertujuan agar masyarakat lebih diberikan kemudahan dalam mencari suatu informasi dan pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara. Strategi yang direalisasikan oleh Diskominfo ini sangatlah berpengaruh dan penting terutama dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Diskominfo sangat penting dalam membantu masyarakat mengatasi masalah dan memberikan kemudahan seperti pelayanan yang buruk, proses yang rumit, tidak ada batas waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, peraturan yang buram, dan sikap yang kurang akomodatif, sehingga menyulitkan bagi sebagian masyarakat. Maka dari itu karena teknologi sudah semakin berkembang dan canggih tim humas Diskominfo Malra harus semakin giat dalam meningkatkan pelayanan - pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu penelitian ini tentang bagaimana strategi yang dilakukan humas diskominfo maluku tenggara dalam mengelola informasi publik menarik untuk diteliti

2. Literatur Review (Penelitian terdahulu)

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicamtumkan penelitian kajian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain :

1. Penelitian Syaifullah, 2019 yang berjudul Strategi Diseminasi Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) dalam Penerapan Transparansi Informasi Di kota Palopo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Diskominfo Kota Palopo dalam peningkatan pelayanan informasi dengan transparansi yaitu menetapkan berbagai macam strategi, yaitu bekerja sama dengan beraneka macam media cetak dan media online kemudian merangkul mereka menjadi media partner, dan juga menjadikan penyebaran informasi dalam bentuk video grafis, fotografis. yang menjadi perbedaan penelitian ini lebih fokus pada peningkatan pelayanan

informasi dengan transparansi sedangkan yang ingin diteliti bagaimana strategi humas diskominfo malra dalam pengelolaan informasi publik .

2. Selanjutnya Penelitian Rara Afrianti (2018) *Aktivitas Pengelolaan Informasi Layanan Publik dalam Mewujudkan Kualitas Komunikasi Di Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Persandian Kabupaten Kampar*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas pemerintah terutama terkait dengan pelayanan public yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar. Permasalahan lembaga public sebagai penyedia informasi dituntut untuk bekerja keras menyiapkan database informasi untuk dipublikasikan. Dengan demikian tujuan penelitian ini focus kepada aktivitas pengelolaan informasi layanan public dalam mewujudkan kualitas komunikasi di Diskominfo Kabupaten Kampar. berbeda dengan penelitian ini yang fokus penelitian strategi humas dalam pengelolaan informasi publik .
3. Skripsi Karya Binarti B, Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. *Tentang Strategi Pemerintah Provinsidalam meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika*. hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dianalisis melalui komponen-komponen penilaian kinerja terdiri dari: Komponen Input, dukungan sumber daya belum terfokus pada penyediaan kebutuhan organisasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - Strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika melalui penataan Organisasi Perangkat Daerah daianalisis berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yaitu: Perencanaan, perencanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika belum difokuskan kepada rencana program penyediaan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terdapat perbedaan antara hasil penelitian, lokasi maupun teori yang digunakan. Dalam hal ini peneliti fokus pada strategi dinas kominfo dalam pengelolaan informasi publik di maluku tenggara.

Penelitian tentang strategi humas dalam pengelolaan informasi publik di Maluku Tenggara menarik perhatian karena memberikan kontribusi yang berbeda dalam konteks peningkatan pelayanan informasi publik. Meskipun literatur sebelumnya telah menyelidiki strategi serupa, seperti yang dilakukan oleh Syaifullah (2019) di Kota Palopo dan Rara Afrianti (2018) di Kabupaten Kampar, penelitian ini menyoroti konteks yang unik dan spesifik dari Maluku Tenggara. Perbedaan tersebut mencakup aspek lokasi, dinamika sosial, dan infrastruktur informasi yang mungkin mempengaruhi strategi yang efektif. Sementara itu, penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Binarti B tentang strategi pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, memberikan landasan konseptual yang penting. Namun, perbedaan antara hasil penelitian, lokasi, dan teori yang digunakan menegaskan perlunya penelitian yang kontekstual dan berfokus pada tantangan spesifik yang dihadapi oleh Malra dalam mengelola informasi publik. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru dan relevan bagi pengembangan strategi humas yang efektif dalam konteks yang unik seperti Maluku Tenggara.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial , sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok . Penelitian kualitatif bersifat induktif . Artinya, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan

terbuka untuk interpretasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif menurut Adiputra et al.,(2021) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis dan akurat sesuai fakta-fakta, sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, merupakan suatu cara untuk mendapatkan data penelitian dengan mengadakan wawancara langsung antara peneliti dengan subjek atau responden penelitian seperti Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara dan pihak terait lainnya. Wawancara menurut Sugiyono (2016:194) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Selain itu digunakan teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto 2002). Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melihat dokumendokumen atau catatan-catatan resmi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang dikumpulkan dengan teknik ini merupakan data sekunder. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data. Menurut Bogdan dalam Hardani, dkk (2020: 161-162) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis menurut Miles dan Huberman (dalam Hardani, 2020: 163) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. Sedangkan Kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya atau keputusan yang didapatkan berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus selaras dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dijelaskan. Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Adapun informan dalam penelitian ini, Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Informan yang dilibatkan dalam penelitian merupakan orang yang dianggap dapat memberikan informasi dan keterangan sesuai dengan situasi dan kondisi objek penelitian. Dalam

penelitian ini data diperoleh langsung dari informan yang diambil adalah Kepala Dinas & Staf Diskominfo yang bertugas di bidang kehumasan dan IKP (Informasi Komunikasi Publik) .

Lembaga informasi dan komunikasi dalam penelitian ini yaitu suatu instansi pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang informasi dan komunikasi, serta tugas lainnya yang relevan (Studi Penelitian Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara).

4. Hasil dan Pembahasan

1. Strategi Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Maluku Tenggara

Pada dasarnya konsep pemberitaan di semua media sama. Berita ditulis berdasarkan hasil liputan fakta di lapangan yang dianggap update, penting dan menarik. Pada awal proses penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara . Peneliti diperkenalkan dengan bagian-bagian dan juga program -Program pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Tenggara serta memberikan penjelasan seputar Diskominfo Malra.

Berdasarkan wawancara antara peneliti dan kepala Dinas . Disampaikan oleh bapak A.Raharusun. S.IP selaku Kepala Dinas komInfo Malra bahwa :

“Perlu diketahui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara berkewajiban untuk menyiapkan rencana strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu tugas dari pada kominfo ialah sebisa mungkin kominfo hadir untuk dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan sebuah informasi”

Dalam menyampaikan sebuah informasi kepada publik yakni masyarakat tentu menjadi tugas yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Diskominfo Maira.

Disampaikan oleh Bapak A.Raharusun. S.IP Selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara :

“Dalam memberikan sebuah informasi kepada masyarakat melalui berita-berita online dengan segala upaya yang dilakukan dapat dikatakan tidak semuanya sampai kepada masyarakat . Mengapa demikian ? Karena adapun jaringan yang belum masuk sampai ke beberapa desa-desa , Kemudian masyarakat yang juga jarang melihat dan membaca berita secara online karena minimnya budaya literasi . Nah melihat akan hal ini Kominfo memiliki beberapa akun media sosial yang sering dipakai dalam mempublikasikan sebuah informasi yakni ada chanel Youtube, Instagram, facebook dan juga Tiktok. Pada beberapa akun medsos tersebut tiktok ini belum begitu masif kita lakukan, tapi untuk facebook,dll itu setiap kali. Adapun juga kita membuat flyer-flyer karena ada beberapa yang mudah ditangkap oleh masyarakat apabila dalam bentuk flyer-flyer yang menarik dan sebagainya, karena masyarakat jarang untuk menonton berita. Tapi disisi lain Kominfo tetap ada berita menggunakan informasi publik milik kementerian Komunikasi dan informasi publik dari seluruh indonesia bisa dilihat di google (infopublik kementerian indonesia.co.id). Namun tidak semua hal wajib

dipublikasikan, di lain sisi apabila terjadi permasalahan atau sesuatu yang perlu ada tanggapan pemerintah daerah maka Dinas Kominfo akan rilis berita kemudian menyebarkannya kepada media-media wartawan-wartawan untuk mempublikasikan berita tersebut”.

Wawancara peneliti dengan bagian pranata humas dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan bagaimana Kominfo melibatkan masyarakat dalam penyampaian informasi? Disampaikan oleh bapak S.Tapotubun, S.Sos selaku pranata humas bahwa :

“Informasi keterlibatan masyarakat ini cenderung dapat dilihat dari tanggapan atau berita-berita yang dipublikasikan. di sisi juga terkadang kita menggunakan strategi counter isu, jadi kita membuat satu isu dan melempar pada grup nanti grup itu yang menyebarkan. Jadi tidak hanya anisif kita yang mempublikasikan tetapi juga kita memanfaatkan grup-grup yang kita sendiri terlibat didalamnya begitupun juga dengan di facebook ada yang membagikan dan lain sebagainya sehingga disatu sisi masyarakat juga terlibat secara aktif dalam mempublikasikan konten-konten”.

Berdasarkan wawancara peneliti dan juga bagian pranata humas Ibu I. Tarantein S.Kom peneliti menanyakan terkait Apakah ada Inovasi tertentu dalam strategi pemberdayaan informasi ? Disampaikan oleh Ibu I.Tarantein, S.Kom bahwa :

“Sekarang ini kita punya podcast dan sekarang Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara punya konten berita yang sudah menggunakan AI jadi reporternya menggunakan AI bukan lagi pegawai. Dilain sisi kita penghematan anggaran karena memang kita tidak mempunyai anggaran untuk honor reporter dan sebagainya sehingga disisi lain kita mencoba untuk lebih update”.

2. Pelayanan Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Maluku Tenggara

a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Perkembangan di bidang komunikasi ditandai dengan berdirinya radio, tv berlangganan yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara. Program media ini selain memberikan hiburan secara gratis kepada masyarakat, juga memberikan informasi tentang berbagai potensi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

b. Bidang Konten, Media Sumber Daya Komunikasi Dan Akses Informasi

Bidang Konten, Media Sumber daya Komunikasi dan Akses Informasi terlaksana sebagai sarana/media penyampaian informasi Pemerintahan dan Pembangunan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan media informasi ini menjadi bagian terpenting yang selalu dilaksanakan selain itu sebagai untuk memperkuat sumber daya komunikasi dan akses informasi publik melalui akun konten pemerintah dan umum yaitu :

Youtube, Facebook, Instagram, Blokir, WA Group Publik, Twiter, Google Upload. Sedangkan media khusus pemerintah website Kabupaten Maluku Tenggara, www.malukutenggarakab.go.id dan portal Nasiona Info Publik www.infopublik.go.id selain itu terdapat tujuh aplikasi pelayanan publik urusan wajib/dasar : LPSE, e-KTP, SIMDA Keuangan, e-Planning, e-Lapor Malra, selain itu

dalam melaksanakan tugasnya wajib memeriksa/memantau konten publik yang dipublish serta konten pemerintah.

Media peningkatan SDM dan tukar-menukar informasi yaitu Media Center Gratis berbasis Teknologi Komputer. Dalam rangka menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi, maka dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan seluruh masyarakat. KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. KIM berkedudukan di kelurahan/ desa atau ohoi.

Berikut data stasiun radio di Kabupaten Maluku Tenggara :

Tabel 4.4

Stasiun Radio di Kabupaten Maluku Tenggara

No	Nama	Frequensi	Nomor Kanal	ALAMAT
1.	LPP RRI Tual	101,2 92,3	111	Langgur

Sumber : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Maluku Tenggara

Tabel 4.5

Media Penyebaran Informasi

No	Media Publikasi	Keterangan
1.	Website	Website Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara www.malukutenggarakab.go.id merupakan getwey pintu masuk akses informasi Pemerintah Daerah Maluku Tenggara baik informasi penyelenggaraan pelayanan public maupun kebijakan dan regulasi daerah.
2.	Talkshow/ Bincang Akhir Pekan	a. Talkshow radio Dilaksanakan di LPP RRI b. Talkshow Televisi Bekerjasama dengan stasiun televisi swasta dan pemerintah
2.	Terbitan Media Cetak	a. Tabloid sarana untuk publikasi kepada masyarakat dalam bentuk media cetak yang terbit secara berkala. b. Majalah sarana publikasi kepada masyarakat yang memuat regulasi dan kebijakan pemerintah
3.	Pengelolaan Penyelenggaraan Penyiaran Radio	Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Tual merupakan media Eletronik Audio milik pemerintah yang merupakan satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat membantu informasi melalui radio ke pelosok-pelosok pada wilayah kepulauan Kei termasuk Kabupaten Maluku Tenggara.
4.	Pengelolaan Penyelenggaraan Penyiaran TV	TV Lokal yaitu TV Berlangganan (Kabel) tersebar di Maluku Tenggara yaitu masih sebagai stasiun siaran terbatas dengan hanya menyiarkan siaran TV Nasional sedangkan siaran lokal tergantung permintaan publik yaitu TV Stenly, TV Rajawali dan TV Elat.

3. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Informasi oleh Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Maluku Tenggara

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pada hakikatnya, pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan pemohon informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Disampaikan dari Bapak A.Raharusun. S.IP selaku kepala dinas Kominfo

“Pada alur penyebaran informasi diskominfo malra selain secara struktural ada bidang IKP (Informasi & Komunikasi Publik) bidang ini dikhususkan untuk penyebaran informasi, peliputan-peliputan dsb. Di dalam bidang IKP juga dibentuk 1 tim khusus yaitu tim media yang dikhususkan untuk meliput kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, meramunya kemudian mempublikasikannya, dan mempublikasikannya dalam berbagai bentuk konten youtube di dalamnya ada konten berita, dokumenter, dan podcast . dapat dilihat pada channel youtube punya Diskominfo Maira, selain itu ada akun yang lain seperti instagram, facebook, tiktok’.

Alur pengelolaan informasi publik pada dinas komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat sebagai berikut :

a. Mengumpulkan Informasi

Hal penting dalam pengelolaan informasi adalah proses pengumpulan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara lebih mementingkan kuantitas informasi daripada tingkat kepentingan yang ditimbulkannya. di dalam masyarakat. Informasi yang diterima oleh Dinas Kominfo Maluku Tenggara bersumber dari materi yang dikumpulkan langsung oleh tim peliput atau mengolah kembali berbagai bahan yang dihimpun dari sumber-sumber kredibel lainnya. Misal media sosial resmi, media massa, atau narasumber terpercaya lainnya. Informasi yang dikumpulkan kemudian diteruskan untuk dikelola oleh konten kreator Dinas Kominfo. Materi/bahan ini diperoleh dalam bentuk teks, foto, maupun video.

b. Pengklarifikasian Informasi

Dalam proses pengklarifikasian, Konten kreator Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara membagi informasi menjadi dua kelompok yaitu informasi yang bersifat public, dan informasi yang dikecualikan. Pada tahapan ini, dilakukan pengkajian terkait kelayakan sebuah informasi untuk diolah lebih lanjut dan kemudian dipublikasikan. Klarifikasi dilaksanakan dengan pihak-pihak yang terkait dengan materi untuk memastikan materi yang akan dipublikasikan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

c. Pendokumentasian Informasi

Informasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara kemudian didokumentasikan dalam beberapa bentuk materi publikasi. Materi tersebut dikelola dalam bentuk teks berita, video berita (audio visual), infografis, siaran radio, maupun foto dokumentasi. Informasi-informasi yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara akan di update di media yang sudah disediakan.

d. Distribusi Informasi

Informasi yang sudah diolah oleh tim konten kreator didistribusikan lewat berbagai media. Adapun media massa tersebut yaitu website (www.malukutenggarakab.go.id), (Infopublik.go.id), (DiskominfoMalra.go.id), dan media sosial (Facebook dan Instagram, Youtube & juga tiktok) Media Center, dan Radio. Selain itu, Dinas Kominfo juga bekerjasama dengan perusahaan media lokal yang ada di Kabupaten Malra, hingga media luar provinsi. Proses pendistribusian informasi oleh Humas Diskominfo Kabupaten Maluku Tenggara ini sangat didukung dengan adanya strategi Kerjasama yang digunakan.

Disampaikan oleh Bapak S.Tapotubun selaku pranata humas bahwa :

“Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mempublikasikan sebuah berita ini dengan meliput setelah itu mengetik mengedit , menyusun berita sesuai dengan bagaimana cara menulis berita dengan benar dan benar , juga menerapkan pola 5W 1H (What, Who, why, When, Where & How). Kemudian diperiksa oleh atasan langsung dalam hal ini pimpinan redaksi yang sudah langsung ditugaskan kepada kepala bidang sehingga berita yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan. Karena Kominfo merupakan media milik pemerintah maka kita harus hadir sebagai penyujuk , dan hadir untuk memberikan informasi

yang lebih baik terlebih khusus program pemerintah daerah sehingga masyarakat mengetahui media yang digunakan saat ini untuk media online selain akun-akun media sosial'.

Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan informasi ?

"Indikator yang pemerintah gunakan ialah SKP (Standar Kinerja pegawai). SKP ini dipakai oleh semua pegawai yang melaksanakan tugas, jadi berapa berita dia suplai itu masuk dalam ukuran kinerja yang bersangkutan. Kita tidak punya standar diluar itu karena ASN menggunakan standar itu, selain kita evaluasi internal terhadap target-target yang dipakai misalnya target tahun kemarin 280 berita sudah kita mencari berita-berita tersebut dan ternyata lebih. Dan pada beberapa tahun kemarin Diskominfo Maira masuk pada sepuluh besar'.

4. Permasalahan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara masih diperhadapkan dengan permasalahan sebagai berikut.

1. Masih terdapat daerah Blank Spot Jaringan Telekomunikasi Seluler dan Internet di Wilayah Pulau Terluar Nuhu Yut/Pulau Kei Besar akibat karakteristik wilayah.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan belum berjalan maksimal akibat keterbatasan sarana/prasarana pendukung berupa peralatan teknologi penunjang pada wilayah blank spot.
3. Masih rendahnya Sistem Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Rendahnya Ekonomi Masyarakat sehingga Informasi Pemerintah yang dipublikasikan secara on line masih belum maksimal diketahui publik.
5. Belum tersedia informasi yang diamankan melalui sistem persandian.
6. Masih rendahnya SDM
7. Masih Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga untuk mempercepat Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Isu Strategis

1. Percepatan Perluasan Jaringan di Wilayah Blank Spot Kei Besar.
2. Pelaksanaan Monev menghasilkan data dan laporan yang baik ditunjang dengan peralatan yang memadai.
3. Percepatan Penerapan Pelaksanaan SPBE.
4. Perluasan Wifi Publik pada Pusat Perkotaan/Pusat Pelayanan Publik.
5. Menentukan informasi yang diamankan.
6. Peningkatan SDM Bidang Statistik dan Persandian
7. Peningkatan koordinasi lintas Stakeholder, Pemprov dan Kementerian/'Lembaga

Berdasarkan wawancara antara Peneliti dan kepala dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Malra Disampaikan oleh bapak A. Raharusun. S. IP bahwa:

"Sejauh ini tentu ada kendala atau permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan informasi. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah kurangnya SDM, Sarana Prasarana, dan beberapa lainnya yang memang menjadi tantangan bagi diskominfo dalam

pengelolaan informasi . Kurangnya SDM ini membuat sehingga terkadang adanya kelalaian karena tidak semua orang memiliki skil yang sama , sehingga terkadang untuk bidang-bidang tertentu saya yang langsung turun tangan untuk mengerjakan. Namun semaksimal mungkin Kominfo dapat mengatasi hal tersebut agar pelayanan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Maluku Tenggara tetap berjalan”.

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini telah mampu memberikan pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai tantangan masih ada pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Disampaikan juga Oleh Ibu I. Taratein, S.Kom selaku pranata humas bahwa :

“Secara umum dalam melaksanakan tugas adapun hal-hal kecil yang terjadi seperti sebagai daerah kepulauan pada saat kita turun pada lokasi pasti membutuhkan yang namanya anggaran itu sudah pasti namun dengan segala keterbatasan yang ada puji Tuhan sejauh ini semua berjalan dengan baik . kemudiaan minimnya SDM yang ada disini untuk bagaimana membantu teman teman yang lain, karena kalau bicara teori tapi kadang saat praktek itu susah. Tapi dengan segala kekurangan yang ada semua berjalan dengan baik dan semua kegiatan pemerintah daerah dapat diliput dan dipublikasikan”.

Wawancara peneliti dengan bagian pranata humas dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan bagaimana Kominfo mengukur keberhasilan dalam menyampaikan informasi? Disampaikan oleh bapak S.Tapotubun, S.Sos selaku pranata humas bahwa :

“Kominfo belum memiliki alat ukur yang pasti terkait dengan publikasi itu dapat tersentuh di masyarakat dalam artian ialah melakukan survei secara berkesinambungan. Memang pernah dalam publikasi kita melakukan survei hanya saja itu data yang sudah lama, tapi kami yakin sungguh bahwa persebaran jaringan seluler di 166 desa yang berbasis internet ini artinya sudah mencapai 86% untuk Kabupaten Maluku Tenggara hanya beberapa wilayah yang ada di kei besar utara timur, jadi yang menggunakan android yang menurut kami usia yang suka mendengar berita sudah pasti di 166 desa tersebut yang sudah bisa mengakses internet maka dengan demikian orang bisa melihat . Ini hanya kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi artinya ketika ingin membeli pulsa data itu sudah pasti membutuhkan uang , nah jika ekonomi terbatas bagaimana mereka dapat mengakses berita-berita . Namun ketika ada respon melalui tanggapan-tanggapan dari masyarakat itu artinya informasi sampai”.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Strategi Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Maluku Tenggara

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Sebagai perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kewajiban untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Fokus pada Kemudahan Akses Informasi merupakan salah satu tugas utama Kominfo adalah mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi. Ini menjadi penting karena tidak semua informasi yang dipublikasikan secara online dapat sampai kepada seluruh masyarakat. Beberapa desa mungkin belum terjangkau oleh jaringan internet, dan budaya literasi juga mempengaruhi seberapa banyak masyarakat yang mengakses berita secara online.

Media Sosial sebagai Sarana Publikasi : Untuk mengatasi kendala akses dan literasi, Kominfo menggunakan beberapa akun media sosial, termasuk saluran YouTube dan Instagram, untuk mempublikasikan informasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara berperan penting dalam menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat.

4.2.2 Pelayanan Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Maluku Tenggara

Dalam rangka memperkuat komunikasi dan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara telah mengambil beberapa langkah:

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik :

- Berdirinya radio dan televisi berlangganan yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara.
- Program media ini tidak hanya memberikan hiburan gratis kepada masyarakat, tetapi juga menyampaikan informasi tentang potensi, kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

2. Bidang Konten, Media, Sumber Daya Komunikasi, dan Akses Informasi:

Dinas ini bertanggung jawab sebagai sarana/media penyampaian informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat.

Beberapa platform yang digunakan meliputi:

- YouTube
- Facebook
- Instagram
- Blog
- WA Group Publik
- Google Upload

Selain itu, terdapat media khusus pemerintah seperti website Kabupaten Maluku Tenggara (maluku.tenggara.kab.go.id) dan portal Nasional Info Publik (infopublik.go.id).

Terdapat juga tujuh aplikasi pelayanan publik yang wajib/dasar :

- LPSE
- e-KTP
- SIMDA Keuangan
- e-Planning
- e-Lapor Malra

Media peningkatan SDM dan tukar-menukar informasi melalui Media Center Gratis berbasis Teknologi Komputer.

Dalam upaya menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah, dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). KIM adalah lembaga layanan publik yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat. KIM berkedudukan di kelurahan/desa.

3. Data Stasiun Radio di Kabupaten Maluku Tenggara :

Sayangnya, data stasiun radio di Kabupaten Maluku Tenggara tidak tercantum dalam informasi yang diberikan.

Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan informasi sampai ke masyarakat dan mendukung pembangunan serta pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat.

4.2.3. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Informasi oleh Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Maluku Tenggara

Dalam bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terjadi perkembangan yang ditandai dengan berdirinya radio dan televisi berlangganan yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara. Program media ini tidak hanya memberikan hiburan gratis kepada masyarakat, tetapi juga menyediakan informasi tentang potensi, kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Di sisi lain, Bidang Konten, Media Sumber Daya Komunikasi, dan Akses Informasi berperan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini:

- 1) **Media Sosial** : Dalam upaya memperkuat sumber daya komunikasi dan akses informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara menggunakan akun media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Blog, WA Group Publik, Twitter, dan Google Upload.
- 2) **Website Khusus Pemerintah** : Website resmi Kabupaten Maluku Tenggara (www.malukutenggara.kab.go.id) dan portal Nasional Info Publik (www.infopublik.go.id) menjadi media khusus yang digunakan untuk menyebarkan informasi pemerintahan.
- 3) **Aplikasi Pelayanan Publik** : Terdapat tujuh aplikasi pelayanan publik yang menjadi urusan wajib/dasar, antara lain LPSE, e-KTP, SIMDA Keuangan, e-

Planning, dan e-Lapor Malra. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memeriksa dan memantau konten publik yang dipublikasikan serta konten pemerintah.

- 4) **Media Peningkatan SDM dan Pertukaran Informasi** : Media Center Gratis berbasis Teknologi Komputer berperan dalam menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. KIM adalah lembaga layanan publik yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan kedudukan di kelurahan/desa atau ohoi 12.

Dalam Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Informasi oleh Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat beberapa aspek penting :

- **Pentingnya Informasi** : Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Keterbukaan informasi publik adalah ciri penting Negara Demokratis yang menghargai kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- **Pelayanan Informasi Publik** : Pelayanan informasi publik melibatkan memberikan layanan kepada pemohon informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Namun, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- **Bidang Informasi & Komunikasi Publik (IKP)** : Dalam alur penyebaran informasi, Diskominfo Malra memiliki bidang IKP yang khusus untuk penyebaran informasi dan peliputan. Tim media di bidang IKP bertugas meliput kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, meramu, mempublikasikan, dan menghasilkan berbagai konten di saluran YouTube Diskominfo Maira, termasuk berita, dokumenter, dan podcast. Selain YouTube, Diskominfo Malra juga aktif di platform lain seperti Instagram, Facebook, dan TikTok.

Alur Pengelolaan Informasi Publik :

Mengumpulkan Informasi :

- Proses pengumpulan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara lebih fokus pada kuantitas daripada tingkat kepentingan.
- Informasi diperoleh langsung dari tim peliput atau melalui pengolahan kembali berbagai bahan yang dihimpun dari sumber-sumber kredibel lainnya, termasuk media sosial resmi, media massa, atau narasumber terpercaya.
- Materi/bahan yang dikumpulkan dapat berupa teks, foto, atau video.

Pengklarifikasian Informasi :

- Konten kreator Dinas Kominfo membagi informasi menjadi dua kelompok: informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.
- Pengkajian dilakukan untuk memastikan kelayakan informasi sebelum diolah lebih lanjut dan dipublikasikan.
- Klarifikasi melibatkan pihak-pihak terkait untuk memastikan materi yang akan dipublikasikan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

- Pendokumentasian Informasi:
- Informasi yang dikelola didokumentasikan dalam berbagai bentuk materi publikasi, termasuk teks berita, video berita (audio visual), infografis, siaran radio, dan foto dokumentasi.
- Materi ini akan di update di media yang sudah disediakan.

Distribusi Informasi :

Tim konten kreator mendistribusikan informasi yang sudah diolah melalui berbagai media massa, termasuk website resmi, media sosial (Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok), Media Center, dan lainnya.

Informasi yang telah diolah oleh tim konten kreator didistribusikan melalui berbagai media, termasuk website resmi (www.malukutenggarakab.go.id), Infopublik.go.id, Diskominfo Malra.go.id, dan media sosial (Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok). Dinas Kominfo juga menjalin kerjasama dengan perusahaan media lokal di Kabupaten Malra dan media luar provinsi. Proses pendistribusian informasi oleh Humas Diskominfo Kabupaten Maluku Tenggara didukung oleh strategi kerjasama.

Menurut hasil penelitian, menjelaskan bahwa tahapan dalam mempublikasikan berita melibatkan proses meliputi, menyetik, mengedit, dan menyusun berita sesuai dengan prinsip penulisan berita yang benar. Pola 5W 1H (*What, Who, Why, When, Where & How*) diterapkan untuk memastikan berita dapat dipertanggungjawabkan. Karena Kominfo merupakan media milik pemerintah, peran mereka adalah memberikan informasi yang lebih baik, terutama terkait program pemerintah daerah, sehingga masyarakat mengetahui media yang digunakan saat ini untuk media online selain akun-akun media sosial.

Terkait evaluasi efektivitas strategi pengelolaan informasi, indikator yang digunakan adalah SKP (Standar Kinerja Pegawai). Evaluasi internal juga dilakukan terhadap target-target yang telah ditetapkan, seperti jumlah berita yang berhasil disuplai. ASN menggunakan standar SKP sebagai acuan, dan evaluasi dilakukan berdasarkan pencapaian target, misalnya jumlah berita yang telah dipublikasikan.

4.2.4 Permasalahan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Daerah Blank Spot Jaringan Telekomunikasi Seluler dan Internet di Wilayah Pulau Terluar Nuhu Yut/Pulau Kei Besar: Masih terdapat wilayah yang tidak tercakup oleh jaringan seluler dan internet karena karakteristik geografisnya.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan belum optimal karena keterbatasan peralatan teknologi di wilayah blank spot.
- Rendahnya Sistem Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Sistem pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan berbasis elektronik masih perlu ditingkatkan.

- Keterbatasan Pengetahuan Publik tentang Informasi Pemerintah: Informasi pemerintah yang dipublikasikan secara online belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat karena rendahnya ekonomi.
- Kekurangan Informasi yang Diamankan melalui Sistem Persandian: Belum ada sistem persandian yang memadai untuk mengamankan informasi.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM): Kekurangan tenaga kerja yang memahami bidang komunikasi dan informatika.
- Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat/Kementerian/Lembaga: Diperlukan koordinasi yang lebih baik untuk mempercepat pembangunan dan pelaksanaan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika.

Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan adalah:

1. Percepatan Perluasan Jaringan di Wilayah Blank Spot Kei Besar.
2. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi dengan Peralatan yang Memadai.
3. Penerapan Sistem Pelayanan Publik dan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Perluasan Wifi Publik di Pusat Perkotaan/Pusat Pelayanan Publik.
5. Penyusunan Informasi yang Aman melalui Sistem Persandian.
6. Peningkatan SDM
7. Koordinasi Lintas Stakeholder dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat/Kementerian/Lembaga.

Menurut hasil penelitian, terdapat kendala dalam pengelolaan informasi. Kurangnya SDM dan sarana prasarana menjadi tantangan bagi diskominfo dalam mengelola informasi.

Berdasarkan wawancara antara Peneliti dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malra, yang disampaikan oleh Bapak A. Raharusun, S. IP, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam proses pengelolaan informasi. Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Diskominfo adalah:

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) : Terbatasnya tenaga kerja yang memahami bidang komunikasi dan informatika.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana : Beberapa wilayah blank spot memiliki keterbatasan peralatan teknologi yang mempengaruhi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- Kekurangan Skil : Tidak semua orang memiliki keterampilan yang sama, sehingga terkadang ada kelalaian dalam pengelolaan informasi. Dalam beberapa kasus, Bapak A. Raharusun turun langsung tangan untuk menyelesaikan tugas tertentu.
- Upaya Maksimal : Diskominfo berusaha semaksimal mungkin mengatasi kendala-kendala tersebut agar pelayanan informasi publik tetap berjalan lancar.

Langkah-langkah yang telah diambil selama ini telah membentuk pondasi yang kuat untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara di masa depan. Namun, tantangan masih ada, dan perlu diantisipasi agar keberhasilan yang lebih baik dapat dicapai di masa mendatang.

- Persebaran Jaringan Seluler : Dengan mencakup 166 desa yang berbasis internet, diperkirakan 86% wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara sudah memiliki akses

internet melalui jaringan seluler. Ini memungkinkan masyarakat yang menggunakan perangkat Android untuk mengakses berita dan informasi.

- Respon dari Masyarakat : Ketika ada tanggapan atau respons dari masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, ini menandakan bahwa informasi telah sampai dan diterima.

Meskipun belum ada survei yang berkesinambungan, upaya untuk memastikan informasi sampai ke masyarakat tetap dilakukan. Terlepas dari keterbatasan ekonomi, akses ke berita dan informasi tetap menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

Meskipun ada keterbatasan, semua kegiatan pemerintah daerah dapat diliput dan dipublikasikan dengan baik. Meski teori dan praktik kadang berbeda, segala kekurangan dihadapi dengan baik

5. Kesimpulan

Sebagai bagian dari Humas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Untuk mempertahankan hubungan sosial yang positif. Bagian Humas Pemerintah Kabupaten menggunakan media untuk memberitahu masyarakat umum. Media massa berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas pada saat ini. Banyak organisasi-organisasi yang memanfaatkan komunikasi luas untuk memasukan data dan strategi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara harus memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik melalui pengelolaan informasi kehumasan yang efektif, yang akan meminimalkan persepsi negatif masyarakat dan menumbuhkan keterbukaan antara masyarakat dan kehumasan. Bagian pengelolaan informasi publik Diskominfo Kabupaten Maluku Tenggara bertugas menyiapkan informasi, formulasi dan bahan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungannya. Ruang lingkup pemerintahan daerah serta pengelolaan informasi pendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daerah dalam pemerintahan daerah, sesuai dengan uraian tugas di bidang informasi publik .

Mengingat bahwa pemerintah daerah memiliki banyak kewenangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peraturan tentang kelembagaan (perangkat) daerah yang lebih berfokus pada lembaga yang dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Akibatnya, kelembagaan kominfo menjadi salah satu instansi yang cenderung tidak menjadi prioritas utama. Pada dasarnya, kelembagaan kominfo mampu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, eksistensi kelembagaan ini seharusnya lebih diprioritaskan daripada bentuk dan jenjang kelembagaan informasi daerah seperti dinas dan badan atau kantor dan bagian. Perbedaan posisi atau tingkat kelembagaan ini tidak hanya berkaitan dengan koordinasi akan tetapi

yang lebih penting adalah fungsi pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.

1. Strategi yang dilakukan diskominfo dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di kabupaten Maluku Tenggara adalah melalui jaringan internet, Media online, media sosial dan media cetak, website-website.
2. Perencanaan yang telah dilakukan untuk mengembangkan strategi adalah dengan penyaringan dan penerimaan informasi, serta progress pengembangan kabupaten Malra dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas.
3. Adapun inovasi yang telah dilakukan diskominfo adalah podcast, Konten berita menggunakan AI.
4. Informasi yang telah diberikan oleh kominfo telah sesuai dengan kenyataan, apabila ada yang tidak sesuai maka hal tersebut bisa di klarifikasi
5. Kendala-kendala yang terjadi di dalam menjalankan tugas & fungsi adalah Minimnya SDM, dan Terbatasnya sarana prasarana.

Ucapan Terima Kasih (Opsional)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa atas karena atas karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini dengan judul "Strategi Humas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Pengelolaan Informasi Publik". Oleh Karenaitu penulis ingin berterima kasih kepada

1. Ibu Yustina Sopacua, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi.
2. Bapak Ronald Alfredo, S. Sos. M.I.Kom, selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi.
3. Kedua Orang tua terkasih yang senantiasa memberikan semangat, serta topangan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini
4. Suami Tercinta yang selalu berkenan memberikan topangan, semangat, dan turut membantu berpartisipasi dalam penyusunan jurnal ini
5. Teman-teman tersayang yang selalu mendukung serta memberikan semangat kepada penulis
6. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan menjadi sumber informasi selama pengerjaan jurnal ini

Daftar Pustaka

Dinas, S. H., & Trisani, F. F. (N.D.). *Strategi Humas Dinas ... (Finnas F.Trisani)*.

Nababan, S. (2020). Strategi Pelayanan Informasi Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 166. <https://doi.org/10.31315/Jik.V17i2.3694>

Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). Analisis Strategi Humas Pemerintahan Era Milenial Dalam Menghadapi Tata Kelola Informasi Publik. *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 286.

<https://doi.org/10.24198/Prh.V6i2.37095>

Sudrajat, Y. (2023). Strategi Diseminasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat Di Kabupaten Mamuju. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 7(1), 287. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V7i1.1060>

Hasna, F. N., & Rohimakumullah, M. A. A. (2022). Strategi Humas Dalam Pengelolaan Aplikasi Website Saker Humas Oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(10), 4049–4060. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V5i10.101>

Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). Analisis Strategi Humas Pemerintahan Era Milenial Dalam Menghadapi Tata Kelola Informasi Publik. *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 286. <https://doi.org/10.24198/Prh.V6i2.37095>

Rania, R., & Diniati, A. (N.D.). Analisis Strategi Humas Diskominfo Kota Bogor Dalam Mengelola Media Sosial Instagram @Kominfobogor. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (Kaganga)*, 6(1). <https://doi.org/10.31539/Kaganga.V6i1.4539>

Tasya Nadia. (2022). *Humas Dinas Komunikasi Dan Informatika Walikota Tangerang Selatan Dalam Membangun Current Image*.

Fitriani, A. (2008). *Keterbukaan Informasi Publik*. 220–228.

Rumra, F. (N.D.). *Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara Management Of Public Information At Information And Communication Agency Of Southeast Maluku*.